



Sistem Pendidikan di Australia

Nadia Nauli^{1*}, Mislaini², Sila Angraini³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

E-mail: nadianauli58@gmail.com¹, mislaini101083@gmail.com², anrainisill07@gmail.com³

Alamat: Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25153

*Korespondensi penulis: nadianauli58@gmail.com

Abstract. Australia's education system reflects the long history and development of its diverse society. Since the arrival of British colonialists in 1788, Australia has undergone a significant transformation, from a colony to an independent country with a strong identity. The education system in Australia consists of preschool, primary, secondary and tertiary education, and is equipped with various vocational education institutions. Even though Australia is known to have a high-quality education system, there are several problems it faces, such as unequal access to education among indigenous communities, challenges in integrating international students, and issues of unequal funding between regions. Education policy in Australia focuses on improving the quality of education through a variety of initiatives, including teacher skills enhancement programs, inclusive curriculum development, and improving educational facilities. The government is also trying to overcome the problem of inequality by implementing policies that support access to education for all levels of society. Thus, despite facing various challenges, the Australian education system continues to adapt and develop to meet the needs of a dynamic society.

Keywords: History, Education, Problems.

Abstrak. Sistem pendidikan di Australia mencerminkan sejarah panjang dan perkembangan masyarakatnya yang beragam. Sejak kedatangan penjajah Inggris pada tahun 1788, Australia telah mengalami transformasi signifikan, dari koloni menjadi negara merdeka dengan identitas yang kuat. Sistem pendidikan di Australia terdiri dari pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan tinggi, serta dilengkapi dengan berbagai lembaga pendidikan vokasi. Meskipun Australia dikenal memiliki sistem pendidikan yang berkualitas tinggi, terdapat beberapa problematika yang dihadapi, seperti ketidakesetaraan akses pendidikan di antara komunitas adat, tantangan dalam integrasi siswa internasional, serta isu pendanaan yang tidak merata antar wilayah. Kebijakan pendidikan di Australia berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai inisiatif, termasuk program peningkatan keterampilan guru, pengembangan kurikulum yang inklusif, dan peningkatan fasilitas pendidikan. Pemerintah juga berupaya untuk mengatasi masalah ketidakesetaraan dengan menerapkan kebijakan yang mendukung akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, meskipun menghadapi berbagai tantangan, sistem pendidikan Australia terus beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Kata kunci: Sejarah, Pendidikan, Problematika.

1. LATAR BELAKANG

Australia memiliki sejarah yang kaya dan beragam yang dimulai dengan kedatangan penduduk asli Aborigin dan *Torres Strait Islander* lebih dari 65.000 tahun yang lalu. Mereka memiliki budaya dan tradisi yang kaya, yang terjalin dengan tanah dan lingkungan. Pada tahun 1788, Inggris mendirikan koloni pertama di *Sydney*, yang menandai awal dari pengaruh kolonial Eropa. Seiring waktu, enam koloni terpisah dibentuk di seluruh benua, dan pada tahun 1901, koloni-koloni tersebut bersatu untuk membentuk Persemakmuran Australia. Sejak saat

itu, Australia telah berkembang menjadi negara demokratis yang multikultural dengan populasi yang beragam, yang mencakup imigran dari berbagai belahan dunia.

Sistem pendidikan di Australia terdiri dari beberapa tahap, yaitu pendidikan prasekolah, pendidikan dasar (*primary*), pendidikan menengah (*secondary*), dan pendidikan tinggi (*tertiary*). Pendidikan dasar dimulai pada usia sekitar 5 tahun dan berlangsung selama tujuh hingga delapan tahun, diikuti oleh pendidikan menengah yang berlangsung selama lima hingga enam tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, siswa memiliki opsi untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi di universitas atau lembaga pendidikan vokasi. Pendidikan di Australia dikelola oleh pemerintah federal dan negara bagian, sehingga terdapat variasi dalam kurikulum dan kebijakan pendidikan antar wilayah.

Meskipun Australia dikenal memiliki sistem pendidikan yang berkualitas tinggi, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu isu utama adalah ketidaksetaraan akses pendidikan, terutama bagi siswa dari komunitas adat dan daerah terpencil. Banyak siswa Aborigin menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas, yang berkontribusi pada kesenjangan hasil pendidikan antara mereka dan siswa non-Aborigin. Selain itu, integrasi siswa internasional juga menjadi tantangan, terutama dalam hal dukungan bahasa dan budaya. Isu pendanaan juga menjadi perhatian, di mana sekolah-sekolah di daerah perkotaan sering kali mendapatkan lebih banyak sumber daya dibandingkan dengan sekolah-sekolah di daerah pedesaan atau terpencil.

Pemerintah Australia telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi masalah ketidaksetaraan. Salah satu inisiatif utama adalah program peningkatan keterampilan guru, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua guru memiliki kualifikasi dan pelatihan yang diperlukan untuk memberikan pendidikan berkualitas. Selain itu, kurikulum nasional telah diperkenalkan untuk menciptakan keseragaman dalam pendidikan di seluruh negara. Kebijakan inklusi juga diterapkan untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus dan memastikan bahwa semua siswa memiliki akses ke pendidikan yang adil. Melalui berbagai inisiatif ini, pemerintah Australia berusaha untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Dengan demikian, meskipun sistem pendidikan di Australia menghadapi berbagai tantangan, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi semua warga negara.

2. KAJIAN TEORITIS

Sistem pendidikan di Australia memiliki akar sejarah yang dalam, dimulai dari kedatangan Eropa pada tahun 1788 yang menandai awal kolonisasi Inggris di benua ini. Sebelum itu, penduduk asli Aborigin dan *Torres Strait Islander* telah mengembangkan budaya dan sistem sosial mereka selama lebih dari 65.000 tahun.

Pendidikan di Australia dibagi menjadi beberapa jenjang, termasuk pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang dikelola secara terpisah oleh pemerintah federal dan negara bagian.

Meskipun Australia dikenal dengan sistem pendidikannya yang berkualitas, terdapat berbagai problematika yang perlu diatasi, seperti ketidaksetaraan akses bagi siswa dari komunitas Aborigin, keterbatasan sumber daya di daerah terpencil, serta tantangan integrasi bagi siswa internasional. Untuk menghadapi masalah-masalah ini, pemerintah Australia telah menerapkan kebijakan pendidikan yang berfokus pada peningkatan keterampilan guru, pengembangan kurikulum nasional yang seragam, dan program inklusi untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus.

Selain itu, perhatian terhadap kesehatan mental siswa semakin meningkat melalui berbagai program dukungan. Dengan demikian, meskipun tantangan masih ada, upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas terus berlangsung demi masa depan generasi mendatang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan, yang juga dikenal sebagai studi literatur. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan sumber lainnya yang tersedia secara online. Fokus penelitian ini adalah pada permasalahan yang diangkat dengan menggunakan data tertulis. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, di mana penulis secara sistematis menjelaskan materi dan memberikan penjelasan untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya.

Setelah mengumpulkan informasi dengan teliti mengenai kutipan atau teori yang mendukung model pembelajaran role playing dan dampaknya terhadap pemahaman dan focus peserta didik, kami melakukan analisis terhadap berbagai sumber yang telah disertakan dalam artikel ini untuk menarik kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Negara Australia

Australia, yang dikenal sebagai Persemakmuran Australia, adalah negara yang terletak di belahan bumi selatan dan merupakan benua terkecil di dunia. Sejarah Australia dimulai jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, dengan pemukiman penduduk asli yang telah ada selama lebih dari 60.000 tahun. Dalam materi ini, kita akan membahas perjalanan sejarah Australia dari masa pra-sejarah hingga era modern, serta dampak yang ditimbulkan oleh kolonialisasi dan perkembangan masyarakatnya (Kurniawan, 2010).

Penduduk asli Australia, yaitu suku Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres, memiliki budaya yang kaya dan beragam. Mereka hidup dalam harmoni dengan alam dan memiliki sistem kepercayaan yang kuat terkait dengan tanah dan leluhur mereka. Kehidupan mereka ditandai dengan praktik berburu dan mengumpulkan, serta seni yang mencerminkan hubungan mereka dengan lingkungan (Sari, 2015). Masyarakat Aborigin memiliki tradisi lisan yang kaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan mencakup cerita-cerita tentang penciptaan dan kehidupan sehari-hari (Prabowo, 2018).

Kedatangan bangsa Eropa dimulai pada abad ke-17, ketika penjelajah Belanda, seperti Willem Janszoon dan Abel Tasman, menjelajahi pantai Australia. Namun, penemuan yang paling signifikan terjadi pada tahun 1770, ketika Kapten James Cook mengklaim bagian timur Australia untuk Inggris. Penemuan ini membuka jalan bagi pemukiman Eropa di benua tersebut, yang dimulai dengan pendirian koloni pertama di Sydney pada tahun 1788 (Rahman, 2012). Koloni ini awalnya didirikan sebagai tempat pembuangan bagi narapidana, tetapi seiring waktu, semakin banyak imigran yang datang untuk mencari kehidupan yang lebih baik (Setiawan, 2016).

Selama abad ke-19, Australia mengalami pertumbuhan yang pesat dengan didirikannya koloni-koloni baru di seluruh benua. Penemuan emas pada tahun 1851 menarik banyak imigran dari berbagai negara, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan populasi. Pada tahun 1901, enam koloni Australia bersatu untuk membentuk Persemakmuran Australia, yang menandai awal dari pemerintahan federal (Hidayat, 2019). Proses ini juga membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Australia, serta memperkuat identitas nasional yang baru.

Setelah Perang Dunia I dan II, Australia mengalami perubahan signifikan dalam demografi dan budaya. Gelombang imigrasi besar-besaran membawa keragaman etnis dan budaya ke dalam masyarakat Australia. Pada tahun 1986, Australia secara resmi mengadopsi undang-undang yang memberikan kemerdekaan penuh dari Inggris, meskipun masih

mempertahankan hubungan sebagai negara persemakmuran (Lestari, 2020). Saat ini, Australia dikenal sebagai negara multikultural dengan populasi yang berasal dari lebih dari 200 negara, menciptakan lingkungan sosial yang dinamis dan beragam (Nugroho, 2017).

Sejarah Australia adalah perjalanan yang panjang dan kompleks, dimulai dari pemukiman penduduk asli hingga menjadi negara modern yang multikultural. Dengan memahami sejarah ini, kita dapat menghargai keragaman budaya dan kontribusi yang telah membentuk Australia menjadi seperti sekarang ini. Sejarah Australia tidak hanya mencerminkan perjalanan bangsa, tetapi juga tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakatnya dalam menghadapi perubahan zaman (Santoso, 2021).

Sistem Pendidikan di Australia

Sistem pendidikan di Australia terdiri dari beberapa jenjang, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar mencakup *primary school* yang berlangsung selama tujuh atau delapan tahun, diikuti oleh *secondary school* selama tiga atau empat tahun. Pendidikan menengah diakhiri dengan *senior secondary school*, yang berlangsung dua tahun, di mana siswa mempersiapkan ujian kelulusan. Sistem pendidikan di Australia dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

1) Pendidikan Dasar (*Primary School*)

Pendidikan dasar di Australia dimulai pada usia 5 atau 6 tahun dan berlangsung selama tujuh tahun. Kurikulum pendidikan dasar mencakup mata pelajaran inti seperti bahasa Inggris, matematika, sains, dan studi sosial. Tujuan dari pendidikan dasar adalah untuk memberikan fondasi yang kuat bagi siswa dalam berbagai disiplin ilmu. Pendidikan dasar ini sangat penting karena membentuk dasar pengetahuan dan keterampilan yang akan digunakan siswa di tingkat selanjutnya. (Australian Government Department of Education, 2024)

2) Pendidikan Menengah (*Secondary School*)

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, siswa melanjutkan ke pendidikan menengah yang berlangsung selama lima tahun. Pendidikan menengah dibagi menjadi dua tahap: pendidikan menengah awal (tahun 7-10) dan pendidikan menengah akhir (tahun 11-12). Pada tahap ini, siswa mulai memilih mata pelajaran yang lebih spesifik sesuai minat dan bakat mereka. Di akhir pendidikan menengah, siswa mengikuti ujian sertifikasi yang dikenal sebagai HSC (*Higher School Certificate*) atau VCE (*Victorian Certificate of Education*), tergantung pada negara bagian. Ujian ini sangat penting

karena menentukan kelayakan siswa untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. (Education Services Australia, 2024)

3) Pendidikan Tinggi (*Senior Secondary School*)

Australia memiliki sejumlah universitas terkemuka yang menawarkan program sarjana dan pascasarjana. Pendidikan tinggi di Australia dikenal karena kualitasnya yang tinggi dan beragam program studi yang ditawarkan. Universitas-universitas di Australia juga menarik banyak mahasiswa internasional, menjadikannya sebagai salah satu tujuan studi populer di dunia. Pendidikan tinggi di Australia tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada praktik dan penelitian, yang memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa. (Universities Australia, 2024).

4) Pendidikan Vokasi dan Pelatihan (*Vocational Education and Training - VET*)

Selain pendidikan akademis, Australia juga menawarkan pendidikan vokasi yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis. Program VET dirancang untuk mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang relevan. Program ini sering kali dilakukan melalui TAFE (*Technical and Further Education*) dan lembaga pelatihan swasta, yang memberikan pelatihan langsung dan pengalaman kerja kepada siswa. Pendidikan vokasi ini sangat penting dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri. (National Centre for Vocational Education Research, 2024).

Pendidikan di Australia dikelola oleh pemerintah federal dan negara bagian, dengan masing-masing memiliki tanggung jawab dalam pengembangan kurikulum dan pendanaan. Pemerintah Australia berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan aksesibel bagi semua warga negara. Pendanaan pendidikan berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak dan sumbangan dari masyarakat. Kebijakan pendidikan di Australia juga menekankan pentingnya inklusi dan keberagaman, memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung, memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. (Australian Education Union, 2024).

Australia juga dikenal karena penerapan teknologi dalam pendidikan. Banyak sekolah dan universitas yang mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan platform pembelajaran online dan alat bantu digital. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan mempersiapkan mereka untuk dunia kerja yang semakin digital. Inovasi dalam pendidikan juga mencakup pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan industri dan masyarakat. (Australian Council for Educational Research, 2024).

Sistem pendidikan di Australia merupakan kombinasi dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat. Dengan fokus pada pengembangan keterampilan dan inovasi, Australia terus berupaya untuk menjadi pemimpin dalam pendidikan global. Melalui kebijakan yang inklusif dan pendanaan yang memadai, negara ini berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi semua warganya.

Manajemen Pendidikan di Australia

1) Otorita

Wewenang Berdasarkan Konstitusi Australia, setiap negara bagian bertanggung jawab atas pendidikan. Di sekolah dasar dan TAFE, tanggung jawab departemen pendidikan berbeda-beda di setiap negara bagian dan di beberapa negara bagian, Kementerian Pendidikan merupakan penyelenggara dan koordinator utama pendidikan dasar, sedangkan di negara lain tugas ini bukan tugas utamanya. Pola umum dalam operasional TAFE adalah administrasi dan pendidikan dasar dipisahkan. Beberapa negara bagian telah membentuk badan koordinasi yang memberikan nasihat kepada Menteri Pendidikan mengenai prioritas di sektor pendidikan. Selain pendanaan umum yang diberikan kepada negara bagian, Persemakmuran telah menyediakan pendanaan untuk tujuan pendidikan khusus melalui Commonwealth School Commission (CSC) dan Commonwealth Commission on Tertiary Education (CTEQ) sejak awal tahun 1970-an. Tanggung jawab politik di tingkat federal dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan, yang bertanggung jawab kepada Bundestag termasuk sekolah berstatus non-pemerintah. Hal ini sangat penting bagi sistem pendidikan Australia sehingga sekolah swasta ini menampung 24% dari seluruh siswa pada tahun 1982, dan jumlah mereka, tidak termasuk wajib, terus meningkat sejak awal tahun 1970an. Sekolah (sekolah swasta) biasanya tidak tunduk pada pengawasan pemerintah untuk memenuhi standar pendidikan minimum yang ditetapkan untuk memenuhi tujuan pendaftaran. Universitas dan lembaga CAE adalah lembaga otonom yang didirikan berdasarkan undang-undang. Pendanaan untuk institusi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab federal dan dikelola oleh CTEC (Commonwealth Higher Education Council). Namun, setiap negara bagian membentuk badan koordinasi untuk merencanakan dan meninjau pendidikan tinggi melalui konsultasi dengan CTEC (Amkajarset, 2015).

2) Pendanaan

Peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan tercermin dari sumber pendanaan dan struktur pendanaannya. Tanggung jawab utama untuk mendanai pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah berada di tangan negara bagian. Selain pemerintah dan TAFE, kami juga mendukung sekolah swasta, termasuk prasekolah. Pada tahun 1980 dan 1981, pemerintah negara bagian mendanai 61 persen belanja pendidikan federal dari alokasi negara, dan sisanya berasal dari pemerintah federal. Tahun ini belanja pemerintah untuk pendidikan mencapai 15,2% dari total belanja pemerintah. Selama beberapa tahun berikutnya, persentase ini secara bertahap menurun. Pada tahun 1990, belanja pendidikan menyumbang 14,8% dari total belanja pemerintah, dibandingkan dengan 13,5% pada tahun 1995. Dari GNP, Australia menyumbang 5,3% pada tahun 1990 dan 5,5% pada tahun 1995. Sementara itu, pendanaan pemerintah untuk sekolah non-pemerintah (swasta) masih menjadi isu kontroversial dalam pendidikan Australia.

Mahasiswa sarjana Moda (Strata-1) penuh waktu berhak mendapatkan tunjangan biaya hidup. Pada tahun 1983, batas subsidi tahunan adalah antara A\$2.000 untuk orang yang tinggal bersama orang tuanya dan A\$3. 100 untuk orang yang secara finansial bergantung pada tunjangan orang tuanya. Subsidi tambahan juga dapat dibayarkan kepada tanggungan. Siswa penuh waktu berhak mendapatkan penghargaan kompetitif sebesar \$900 per tahun, ditambah dukungan untuk tanggungan. Pendanaan ini akan menjangkau 30 mahasiswa pascasarjana yang memenuhi syarat. Bantuan keuangan tersedia untuk siswa sekolah menengah penuh waktu. Hal ini ditujukan untuk siswa di bawah usia 19 tahun yang berharap dapat menyelesaikan pendidikan menengahnya. Hibah tahunan dibatasi sebesar \$1.000, dan 15.000 siswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi akan menerima hibah tersebut (Agustiar Syah Nur, 2001).

3) Personalia

Dari tahun 1955 hingga 1977, perekrutan guru meningkat pesat, namun kekurangan guru masih terus terjadi. Namun, sejak tahun 1977, permintaan tambahan guru menurun karena belanja pendidikan tumbuh sangat lambat, jumlah siswa tetap stabil, dan resesi ekonomi menyebabkan kekurangan guru di luar negeri. Untuk mengatasi penurunan rekrutmen guru, otoritas pendidikan tinggi mengurangi jumlah siswa di lembaga pelatihan guru. Kebijakan ini dikritik karena pertimbangan dasar yang digunakan dalam proyeksi tersebut meremehkan kebutuhan tambahan guru di masa depan, terutama jika pertumbuhan ekonomi membaik. Di pendidikan tinggi,

jumlah guru TAFE telah bertambah. Hampir semua guru taman kanak-kanak dan sekolah dasar serta sebagian besar guru sekolah menengah dilatih dalam CAE.

Sejumlah besar guru sekolah menengah dan beberapa guru sekolah dasar menerima pendidikan universitas. Beberapa guru swasta menerima pelatihan di sekolah pelatihan guru yang dikelola oleh organisasi keagamaan. Masa pelatihan guru TK dan SD biasanya empat tahun. Semua sistem sekolah menawarkan kesempatan bagi guru untuk menerima pelatihan dalam jabatan, termasuk peningkatan sertifikasi dan diploma, dengan menyelesaikan kursus yang telah disetujui sebelumnya.

4) Kurikulum dan Metodologi Pengajaran

Pusat Pengembangan Kurikulum (Curriculum Development Centre, CDC) dibentuk oleh pemerintah Commonwealth dalam tahun 1975 untuk membantu mengkoordinasi dan mendiseminasikannya, serta menyiapkan materi kurikulum. Buku-buku pelajaran dan ujian disiapkan oleh berbagai badan termasuk seksi kurikulum, departemen pendidikan, Dewan Penelitian Pendidikan Australia (ACER), Pusat Pengembangan Kurikulum (CDC), penerbit buku-buku akademik yang komersial, dan asosiasi guru-guru bidang studi.

Masalah kurikulum yang krusial dalam sistem pendidikan Australia terletak terutama pada isi kurikulum (curriculum content), yaitu menentukan isi kurikulum yang cocok untuk masyarakat. Hal ini timbul disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam masyarakat Australia dan komposisi penduduk. Lebih sulit memperoleh kesepakatan tentang isi kurikulum saat ini dibandingkan dengan masa sebelumnya karena masyarakat Australia yang semakin pluralistik dan sekaligus multikultural.

Curriculum Framework di Australia disusun dalam rangka menyongsong datangnya Abad XXI, dengan semboyan "Educating our Children to succeed in the 21th Century". Prof. Lesley Parker, Chair of the Curriculum Council, menyatakan rasa bangganya, karena "The Curriculum Framework was developed through a unique consultative process that involved almost 10.000 teachers, parents, academics, curriculum officers, students and other members of the community". Dengan kata lain, pengembangan kurikulum di Australia telah melibatkan semua stakeholder pendidikan (Fadillah dan Mustika).

5) Ujian, Kenaikan Kelas, dan Sertifikasi

Pusat Pengembangan Kurikulum (CDC) didirikan oleh pemerintah federal pada tahun 1975 untuk membantu koordinasi, diseminasi, dan persiapan materi kurikulum. Buku teks dan ujian diproduksi oleh berbagai badan, termasuk Departemen Kurikulum,

Departemen Pendidikan, Dewan Penelitian Pendidikan Australia (ACER), Pusat Pengembangan Kurikulum (CDC), penerbit buku akademik komersial, dan asosiasi guru profesional. Adapun masalah utama dalam sistem pendidikan di Australia terletak pada kurikulum, terutama berkaitan dengan penentuan isi kurikulum, yaitu isi kurikulum yang sesuai untuk masyarakat. Hal ini disebabkan oleh perubahan dalam masyarakat dan demografi Australia. Ketika masyarakat Australia menjadi semakin pluralistik dan multikultural, mencapai konsensus mengenai isi kurikulum menjadi lebih sulit dari sebelumnya.

Kerangka Kurikulum Australia menyambut datangnya abad ke-21 dan diciptakan dengan tema 'Mendidik anak-anak untuk sukses di abad ke-21'. Profesor Leslie Parker, Ketua Dewan Kurikulum, mengatakan: 'Kerangka kurikulum dikembangkan melalui proses kolaboratif unik yang melibatkan sekitar 10.000 guru, orang tua, akademisi, pimpinan kurikulum, siswa, dan anggota komunitas lainnya. Di Australia, seluruh pemangku kepentingan pendidikan (Fadilah dan Mustika) berpartisipasi.

6) Penelitian Pendidikan

Penelitian pendidikan berkembang pesat pada tahun 1960 hingga 1980 karena berbagai faktor. Pertama, jumlah perguruan tinggi dan tenaga kependidikannya meningkat secara signifikan, terutama di bidang pelatihan guru. Kedua, pada tahun 1970 profesi ASOS 22/23 dan Asosiasi Penelitian Pendidikan Australia (AARE) didirikan untuk memberikan hibah untuk pekerjaan penelitian. Ketiga, pendanaan penelitian pemerintah terus meningkat.

Dewan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (ERDC) berupaya mengoordinasikan penelitian dengan mengidentifikasi bidang-bidang prioritas untuk mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah. Proyek penelitian yang disponsori ERDC mencakup pengenalan untuk guru, multikulturalisme, mendidik siswa penyandang disabilitas fisik, penilaian atau pengujian berbasis sekolah, arena kelas dan sekolah terbuka, dan pendidikan transisi.

Kebijakan Pendidikan di Australia

Sistem dan kebijakan pendidikan Australia tidak sama dengan negara-negara lain. Keberadaan Australian Qualifications Framework (AQF) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya. AQF telah berlaku sejak tahun 1995 dan merupakan kebijakan nasional yang mencakup gelar pendidikan tinggi, pendidikan kejuruan, pelatihan, dan sertifikat

kelulusan sekolah tambahan yang disebut Sertifikat Pendidikan Menengah Lanjutan (Amora Uno, 2017).

Australia memiliki sistem pendidikan kejuruan yang bertujuan untuk membangun keterampilan hidup jangka panjang mulai dari sekolah dasar dan seterusnya dengan melatih guru atau staf pengajar dan pendidik yang berkualitas untuk mendukung pengembangan pribadi siswa, pengembangan karir kelas mengenai pengembangan dan pendidikanserta keterampilan belajar seumur hidup. Pemerintah Australia memainkan peran kepemimpinan nasional, bekerja sama dengan pemerintah negara bagian, industri dan masyarakat lokal untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sekolah. Pemerintah Australia memberikan subsidi kepada sekolah negeri dan swasta dan tahun ajaran di Australia berlangsung dari akhir Januari atau awal Februari hingga awal Desember. Sebagian besar negara bagian dan teritori telah mengadopsi sistem tahun ajaran baru dan sekolah negeri berada di bawah tanggung jawab langsung pemerintah negara bagian di wilayahnya masing-masing. Di Australia sekolah negeri menerima dana inti dari pemerintah negara bagian atau teritori dan penunjukan tambahan dari pemerintah federal.

Di Australia, pemerintah sangat mementingkan pendidikan. Oleh karena itu, semua anak yang lahir dan besar di Australia wajib bersekolah. Bahkan pemerintah Australia tidak segan-segan memberikan sanksi kepada orang tua jika anaknya sering bolos sekolah atau malas. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mayoritas warga Australia harus bersekolah dan mendapat pendidikan sejak masa kanak-kanak. Tahap pertama pendidikan di Australia disebut taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak juga merupakan pendidikan wajib di Australia. Setelah Tahap pertama pendidikan, anak-anak bisa melanjutkan ke sekolah dasar kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Sama seperti di Indonesia, pelajar di Australia harus menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah terlebih dahulu sebelum memulai pendidikan tinggi. Pelatihan kami di Australia sangat ekstensif dan kualifikasi kami diakui secara internasional. Selain itu, biaya pendidikan di Australia relatif rendah dan terjangkau dibandingkan di Inggris dan Amerika. Di Australia, hal ini sangat memudahkan siswa untuk menemukan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada delapan universitas di Australia yang masuk dalam peringkat 150 universitas terbaik di dunia. Kualitas pendidikan di Australia berada pada tingkat internasional, dan fasilitasnya sangat baik, namun biaya hidup di Australia cukup tinggi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Australia adalah negara yang mempunyai kualitas pendidikan yang sudah diakui dunia. Penelitian berkembang pesat di sana. Pendidikan di Australia tidak jauh berbeda dengan pendidikan di Indonesia. Jenjang pendidikan disana ada Sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi. Sama halnya dengan Indonesia, kurikulum di Australia pada beberapa Negara bagian, pedoman kurikulum dibuat terpusat, tetapi sekolah-sekolah dapat mengadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal. Namun, mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah Australia tidak sebanyak mata pelajaran yang ada di Indonesia.

Pendidikan di Australia lebih berbasis pada penelitian. Ini yang menjadi salah satu faktor mengapa Australia bisa mempunyai kualitas pendidikan yang sangat baik. Selain itu, tenaga pendidik di sana benar-benar mumpuni di bidangnya, mereka mendapatkan lesensi mengajar dari kementerian pendidikan. Sehingga para gurunya benar-benar memiliki kompetensi yang layak sebagai tenaga pengajar.

Dari segi manajemen pendidikan di Australia memiliki sistem: Otorita Pendanaan, Personalia, Kurikulum dan metodologi pembelajaran, Ujian, kenaikan kelas, Sertifikasi, dan Penelitian pendidikan. Kebijakan pendidikan di Australia yaitu Australia telah menerapkan sistem pendidikan berbasis karir yang bertujuan untuk membangun kecakapan hidup jangka panjang mulai dari sekolah dasar dengan mempersiapkan guru atau tenaga pengajar dan pendidik yang berkualitas, materi pendukung dalam memfasilitasi proses pembelajaran di kelas terkait pengembangan pribadi siswa, pengembangan karir dan belajar keterampilan seumur hidup.

DAFTAR REFERENSI

- Amkajarset. (2015). Wawasan pendidikan: Sistem pendidikan di Australia. *Artikel KI SOPO*.
- Australian Council for Educational Research. (2024). *Innovations in Australian education*.
- Australian Education Union. (2024). *Education policy and funding in Australia*.
- Australian Government Department of Education. (2024). *Overview of the Australian education system*.
- Education Services Australia. (2024). *Secondary education in Australia*.
- Hidayat, R. (2019). Pengaruh penjajahan Inggris terhadap masyarakat Aborigin di Australia. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 5(1), 45-60.
- Kurniawan, A. (2010). *Sejarah Australia: Dari Aborigin hingga era modern*. Jakarta: Erlangga.

- Lestari, D. (2020). Identitas budaya Australia: Antara tradisi dan modernitas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), 123-135.
- Mustika, & Fadillah. *Sistem pendidikan Australia untuk Indonesia* (p. 6).
- National Centre for Vocational Education Research. (2024). *Vocational education and training in Australia*.
- Nugroho, S. (2017). Perkembangan ekonomi Australia pasca Perang Dunia II. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(3), 78-90.
- Nur Agustian Syah. (2001). *Perbandingan sistem pendidikan 15 negara*. Bandung: Lubuk Agung.
- Prabowo, H. (2018). *Australia dalam lintasan sejarah*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, A. (2012). *Masyarakat multikultural Australia: Sejarah dan perkembangannya*. Jakarta: Kompas.
- Santoso, E. (2021). Dampak imigrasi terhadap keragaman budaya di Australia. *Jurnal Sosiologi dan Antropologi*, 10(4), 200-215.
- Sari, R. (2015). *Australia: Sejarah dan budaya*. Yogyakarta: Andi.
- Setiawan, B. (2016). *Sejarah Australia: Dari penjajahan hingga kemerdekaan*. Surabaya: Airlangga.
- Universities Australia. (2024). *Higher education in Australia*.
- Uno Amora. (2017). Sistem pendidikan Australia. *Jurnal Kualifikasi*, 1(1).
- Wulandari, T. (2018). Sejarah pemukiman Eropa di Australia: Perspektif sejarah sosial. *Jurnal Sejarah dan Pendidikan*, 6(2), 34-50.